



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 168 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 139 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Renja disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi, dan setelah diverifikasi disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); ✓
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);

22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 21).
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024 adalah
 - a. sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk kurun waktu Tahun 2024 yang mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
 - b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja impact sasaran, *outcome* program dan *output* kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024 adalah :
 - a. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
 - b. Menjadi pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.
 - c. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA RENJA

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika

penulisan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas, Review terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas, program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

- (2) Uraian Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan Renja melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tahun 2024.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024 berpedoman atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja Dinas Tahun 2024.

BAB VI
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renja;
 - b. pelaksanaan Renja; dan
 - c. hasil capaian Renja.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda secara berkala.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓
- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. Program dan/atau kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
 - b. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
 - d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK); dan
 - e. Target dan Capaian Indikator *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- (6) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renja Dinas dan didukung aplikasi Simonek untuk monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja *output*, *outcome* dan sasaran strategis Dinas dan kinerja daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas selaku Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis atau indikator kinerja utama dinas yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (2) Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Administrasi

mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target *outcome* program yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *outcome* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.

- (3) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara yang ditunjuk sebagai sub koordinator dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, *outcome* dan *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja dan realisasi keuangan yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi keuangan dan capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VII

PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Renja Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Penjabaran dari Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi capaian Renstra, tujuan, sasaran dinas, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang dituangkan dalam Renja.
- (3) Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan serta indikator sub kegiatan pada Renja Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 22 Desember 2023



Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 168 Tahun 2023
TANGGAL : 22 Desember 2023
TENTANG : RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. Pendekatan dalam penyusunan APBD yang selama ini menggunakan sistem anggaran tunai (SAT) yang lebih menekankan pada penggunaan sumberdaya dan dana (input), diubah menjadi anggaran pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (Output) dari perencanaan alokasi biaya (Input) yang ditetapkan.

Sebagai dasar kebijakan dalam penyusunan rencana kerja tahunan ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, Provinsi Jawa Barat dan hasil evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan, serta mempertimbangkan pula aspirasi masyarakat, terutama yang disampaikan dalam MUSRENBANG bersama seluruh Dinas/Instansi terkait, termasuk dengan unsur Legislatif.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024, sejumlah peraturan perundangan, Perda dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD adalah :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61 Seri D.10).
 - j. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 21).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :
 - 1. Sebagai acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon dan bagi masyarakat karena memuat kebijakan pelayanan Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan
 - 2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon yang memuat arah kebijakan pelayanan Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah.
 - 3. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk peningkatan kinerja pelayanan Bidang Ketahanan Pangan dan Bidang Perikanan.
- b. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon adalah :

1. Menjadi pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan seluruh kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada Tahun 2024.
2. Menjadi acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan.
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja.

1.4 SISTEMATIKA

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah
	2.4 Riview terhadap Rancangan Awal SKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD

Capaian Kinerja dan anggaran selama tahun 2022 dinilai *Baik*. Hal tersebut dapat dilihat pada realisasi indikator sasaran yang pada umumnya melebihi target 100 %. Namun begitu masih banyak permasalahan yang belum tercapai pada pelaksanaannya, mengingat adanya pembatasan pembagian kewenangan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menerangkan wilayah laut sudah merupakan kewenangan Pemerintahan provinsi, selain itu kurangnya personil dan sarana prasarana lapangan menjadi keterbatasan dinas untuk melakukan pembinaan dan monitoring terhadap SDM maupun SDA lingkup Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon.

Hasil capaian Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun 2022 mengenai penyerapan dana dapat dilihat pada indikator persentase berikut :

1. Non Urusan

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.672.807.051,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.976.396.705,- (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) sisa sebesar Rp. 696.410.346,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) atau tercapai sebesar 91,97%

Outcome program adalah Persentase pemenuhan capaian kinerja program.

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 180.879.875,- (Seratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 179.503.500,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 1.376.375,- (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) atau tercapai sebesar 99,24%

Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah.

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.730.800,- (Seratus Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 100.640.100,- (Seratus Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 90.700,- (Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 99,91%

Output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan.

b. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.145.000,- (Lima Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 53.937.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 208.000,- (Dua Ratus

Delapan Ribu Rupiah) atau tercapai sebesar 99,62%

Output sub kegiatan adalah Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.

- c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.004.075,- (Dua Puluh Enam Juta Empat Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 24.926.400,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 1.077.675,- (Satu Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) atau tercapai sebesar 95,86%

Output sub kegiatan adalah Penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas.

- B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.732.590.400,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 6.176.411.557,- (Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) sisa sebesar Rp. 556.178.843,- (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) atau tercapai sebesar 91,74 %

Output kegiatan adalah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.726.590.400,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 6.170.411.707,- (Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Sepuluh rupiah) sisa sebesar Rp. 556.178.693,- (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) atau tercapai sebesar 91,73%

Output sub kegiatan adalah Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangannya setiap bulan terhadap pegawai / ASN.

- b. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%

Output sub kegiatan adalah Terlaksananya pembinaan pengelolaan Akuntansi SKPD.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.999.850,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) sisa sebesar Rp. 150,- (Seratus Lima Puluh Rupiah) atau tercapai sebesar 100%

Output sub kegiatan adalah Jumlah laporan keuangan akhir tahun.

- C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 114.211.950,- dan terealisasi sebesar Rp. 114.211.950,- (Seratus Empat Belas Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) sisa sebesar

Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%

Output kegiatan adalah Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran.

- a. **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.011.100,- (Lima Juta Sebelas Ribu Seratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 5.011.100,- (Lima Juta Sebelas Ribu Seratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%

Output sub kegiatan adalah Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.

- b. **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.605.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.605.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%

Output sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.

- c. **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%

Output sub kegiatan adalah Jumlah makan minum rapat dan tamu setiap bulan.

- d. **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.675.600,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 19.675.600,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%

Output sub kegiatan adalah Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan.

- e. **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.300.000,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 16.300.000,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%

Output sub kegiatan adalah Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan setiap bulan.

- f. **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.307.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.307.800,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%

Output sub kegiatan adalah Jumlah ATK yang disediakan tiap bulan.

- g. **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.312.450,- (Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 31.312.450,- (Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%

Output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam 1 (satu) tahun.

- D. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 233.944.976,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 167.022.764,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) sisa sebesar Rp. 66.922.212,- (Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah) atau tercapai sebesar 71,39%

Output kegiatan adalah Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Kantor.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 211.694.976,- (Dua Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 144.772.764,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) sisa sebesar Rp. 66.922.212,- (Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah) atau tercapai sebesar 68,39%

Output sub kegiatan adalah Jumlah jasa layanan telepon, air, listrik selama 1 (satu) tahun.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.250.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu) dan terealisasi sebesar Rp. 22.250.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu) sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%

Output sub kegiatan adalah Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki.

E. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.411.179.850,- (Satu Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.339.246.934,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah) sisa sebesar Rp. 71.932.916,- (Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah) atau tercapai sebesar 94,90%

Output kegiatan adalah Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.439.900,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 195.705.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 54.734.900,- (Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 78,14%

Output sub kegiatan adalah Terpeliharanya kendaraan dinas.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.951.500,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 15.385.500,- sisa sebesar (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) Rp. 566.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) atau

tercapai sebesar 96,45%

Output sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan yang diurus perizinannya dan terpeliharanya kendaraan dinas / operasional.

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.144.788.450,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.128.156.434,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) sisa sebesar Rp. 16.632.016,- (Enam Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Belas Rupiah) atau tercapai sebesar 98,55 %

Output sub kegiatan adalah 1. Jumlah gedung kantor/gudang dan peralatan gedung kantor yang dipelihara dengan rutin. 2. Sewa Tanah UPT Benih Ikan.

- 2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.334.097.900,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.222.988.400,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 111.109.500,- (Seratus Sebelas Juta Seratus Sembilan Ribu Lima RatusRupiah) atau tercapai sebesar 91,67%

(1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.348.100,- (Seratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 102.226.400,- (Seratus Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 10.121.700,- (Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 90,99%

Outcome program adalah Persentase LPM yang dimandirikan

- A. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.348.100,- (Seratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 102.226.400,- (Seratus Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 10.121.700,- (Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 90,99%

Output kegiatan adalah Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dapat mendukung tercapainya kemandirian pangan

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.348.100,- (S ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 102.226.400,- (Seartus Dua Juta Dua Ratus Dua puluh Enam ribu Empat Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 10.121.700,- (Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 90,99%

Output sub kegiatan adalah Jumlah infrastruktur lumbung pangan Masyarakat yang dikembangkan.

(2) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 880.724.500,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 787.471.100,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 93.253.400,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 89,41%

Outcome program adalah 1. Persentase ketersediaan pangan terhadap jumlah kebutuhan pangan., 2. Persentase kelompok pangan yang terkendali harganya, 3. Tingkat Keanekaragaman Konsumsi Pangan.

A. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 363.355.700,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 357.064.200,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 6.291.500,- atau tercapai sebesar 98,27%

Output kegiatan adalah Jumlah pangan pokok (beras) yang tersedia dan tersalurkan oleh LUPM maupun oleh daerah.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.599.700,- (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 78.620.300,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 1.979.400,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 97,54%

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Pangan.

b. Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 133.462.000,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 133.073.550,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) sisa sebesar Rp. 388.450,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) atau tercapai sebesar 99,71%

Output sub kegiatan adalah Jumlah Data dan informasi harga pangan pokok tingkat produsen dan pedagang tiap bulan.

c. Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 149.294.000,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 145.370.350,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) sisa sebesar

Rp. 3.923.650,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) atau tercapai sebesar 97,37%. **Output** sub kegiatan adalah Jumlah PUPM yang ditumbuhkan dan dikembangkan.

B. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.744.800,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 4.326.700,- (Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 83.418.100,- (Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Rupiah) atau tercapai sebesar 4,93%

Output kegiatan adalah Jumlah stok gabah di kab. Cirebon.

a. Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.744.800,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 4.326.700,- (Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 83.418.100,- (Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Rupiah) atau tercapai sebesar 4,93%

Output sub kegiatan adalah Jumlah jenis pangan pokok yang dikelola keseimbangannya.

C. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 429.624.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 426.080.200,- (Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 3.543.800,- (Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 99,18%

Output kegiatan adalah Jumlah kelompok / jenis pangan yang kecukupan gizinya memenuhi target.

a. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.919.900,- (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 53.230.400,- sisa sebesar Rp. 2.689.500,- atau tercapai sebesar 95,19%

Output sub kegiatan adalah SK penetapan target konsumsi.

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 333.941.400,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 333.941.400,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100% **Outputs** sub kegiatan adalah Jumlah pelatihan diseminasi pangan B2SA, Jumlah revitalisasi P2L.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.762.700,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu

Tujuh Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 38.908.400,- (Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 854.300,- (Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 97,85%

Output sub kegiatan adalah Jumlah Revitalisasi KRPL, (Satuan: KWT)

(3) Program Penanganan Kerawanan Pangan

Alokasi anggaran untuk Program Penanganan Kerawanan Pangandengan alokasi anggaran sebesar Rp. 160.013.500,- (Seratus Enam Puluh Juta Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 153.189.100,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 6.824.400,- (Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 95,74%

Outcome program adalah Berkurangnya daerah rawan pangan.

A Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.599.500,- (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 74.392.600,- (Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 6.206.900,- (Enam Juta Dua Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 92,30%

Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan.

a. Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran Dan Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.599.500,- (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 74.392.600,- (Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 6.206.900,- (Enam Juta Dua Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 92,30%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen FSVA.

B. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.414.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 78.796.500,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 617.500,- (Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 99,22%

Output kegiatan adalah Jumlah Desa Rawan Pangan yang ditangani.

a. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.414.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 78.796.500,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 617.500,- (Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 99,22%

Output sub kegiatan adalah Jumlah desa rawan pangan yang terkoordinasi dan tersinkronisasi.

(4) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Alokasi anggaran untuk Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 181.011.800,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 180.101.800,- (Seratus Delapan Puluh Juta Seratus Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 910.000,- (Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) atau tercapai sebesar 99,50%

Outcome program adalah Persentase PSAT aman dikonsumsi.

A Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 181.011.800,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 180.101.800,- (Seratus Delapan Puluh Juta Seratus Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 910.000,- (Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) atau tercapai sebesar 99,50%

Output kegiatan adalah Prosentase jumlah sampel yang aman.

a. Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.044.900,- (Lima Puluh Empat Juta Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 53.574.900,- (Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 470.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atau tercapai sebesar 99,13%

Output sub kegiatan adalah Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 126.966.900,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 126.526.900,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 440.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) atau tercapai sebesar 99,65%

Output sub kegiatan adalah Jumlah sampel yang diuji

Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan yang ada di lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan khususnya untuk urusan pangan terdapat beberapa Sub kegiatan yang masih kurang realisasinya dari anggaran yang sudah disediakan diantaranya yaitu Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang hanya terealisasi sebesar 4,93%. Terkait dengan sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait dengan memperhatikan saran dan arahan dari inspektorat maka untuk kegiatan ini tidak dilanjutkan karena tidak sesuai dengan indikator kinerja yang ada pada sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.112.684.525,- (Enam Milyar Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 4.547.940.852,- (Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) sisa sebesar Rp. 1.564.743.673,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat

Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) atau tercapai sebesar 74,40 %

(1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.359.836.600,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.196.729.004,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 1.163.107.596,- (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 50,71%

Outcome program adalah Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

A. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 199.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 196.906.800,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 2.093.200,- (Dua Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 98,95%

Output kegiatan adalah Jumlah Kelompok Perikanan tangkap yang terbina.

a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 133.607.300,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 1.392.700,- (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 98,97%

Output sub kegiatan adalah 1. Jumlah nelayan yang mengikuti Bimbingan teknis. 2. Jumlah nelayan yang mengikuti Sosialisasi., 3. Jumlah nelayan yang mengikuti Pembinaan.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 64.000.000,- (Enam Puluh Empat Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 63.299.500,- (Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 700.500,- (Tujuh Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 98,91%

Output sub kegiatan adalah 1. Jumlah lembaga/kelompok nelayan kecil yang terbentuk, 2. Jumlah lembaga/kelompok nelayan kecil yang terbina.

B. Kegiatan Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.160.836.600,- (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 999.822.204,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Rupiah) sisa sebesar Rp. 1.161.014.396,- (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 46,27%

Output kegiatan adalah Jumlah Tempat pelelangan ikan yang beroperasi.

a. Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan Dan Penyelenggaraan

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.724.500,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 43.123.900,- (Empat Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 6.600.600,- (Enam Juta Enam Ratus Ribu Enam Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 86,73%

Output sub kegiatan adalah Jumlah 1. stakeholder yang mengikuti sosialisasi peraturan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, 2. Jumlah pengelola Tempat Pelelangan Ikan yang terbina., 3. Jumlah Dokumen Perumusan kebijakan Tempat pelelangan ikan.

- b. Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Tpi)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.111.112.100,- (Dua Milyar Seratus Sebelas Juta Seratus Dua Belas Ribu Seratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 956.698.304,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah) sisa sebesar Rp. 1.154.413.796,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) atau tercapai sebesar 45,32%

Output sub kegiatan adalah 1. Jumlah Pengadaan sarana tempat pelelangan ikan. 2. Jumlah sarana tempat pelelangan ikan yang terpelihara, (Satuan: TPI), 3. Jumlah tempat pelelangan ikan yang dikembangkan., 4. Jumlah Nelayan Kecil yang mengurus BPKP, 5. Jumlah Surat Rekomendasi BBM bersubsidi bagi nelayan yang diterbitkan., 6. Jumlah surat pengantar surat tanda keterangan andon (STKA) bagi nelayan yang diterbitkan..

(2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.227.298.600,- (Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 3.122.625.300,- (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 104.673.300,- (Seratus Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 96,76%

Outcome program adalah 1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya. 2. Jumlah Produksi Pembenihan Ikan.

- A. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 99.866.300,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 133.700,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 99,87%

Output kegiatan adalah Jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan.

- a. Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar

Rp. 99.866.300,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 133.700,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 99,87%

Output sub kegiatan adalah 1. Jumlah stakeholder yang mengikuti Bimbingan teknis pembenihan ikan, 2. Jumlah Dempond Budidaya Ikan, 3. Jumlah stakeholder yang mengikuti Bimbingan teknis teknologi budidaya ikan air tawar dan payau, 4. Jumlah kelompok yang mengikuti Pertemuan penguatan kelembagaan kelautan dan perikanan., 5. Jumlah kelompok yang mengikuti Peningkatan kelas kelompok kelautan dan perikanan, 6. Jumlah Pelatihan Budidaya Ikan.

- B. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.127.298.600,- (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 3.022.759.000,- (Tiga Milyar Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 104.539.600,- (Seratus Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 96,66%

Output kegiatan adalah Jumlah pembenih dan pembudidaya ikan yang terbina.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.800.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.718.023.100,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 81.976.900,- (Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 97,07%

Output sub kegiatan adalah 1. Jumlah benih yang di hasilkan pada UPT benih ikan, 2. Jumlah Pengadaan prasarana budidaya ikan. 3. Jumlah pertemuan yang terfasilitasi dalam pengelolaan Prasarana Budidaya Ikan.

- b. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 155.483.600,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 134.162.200,- (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 21.321.400,- (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 86,29%

Output sub kegiatan adalah Jumlah 1. benih yang dihasilkan pada UPT benih ikan. 2. Jumlah Pengadaan sarana budidaya ikan.

- c. Sub Kegiatan Pembinaan Dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan Di Darat** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 115.880.000,- (Seratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 114.638.700,- (Seratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 1.241.300,- (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau tercapai

sebesar 98,93%

Output sub kegiatan adalah 1. Pembinaan teknis budidaya air tawar, 2. Pembinaan Teknis Budidaya Air Payau.

- d. **Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan Dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan Di Darat** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.935.000,- (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 55.935.000,- (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%

Output sub kegiatan adalah 1. Jumlah stakeholder yang mengikuti Bimbingan teknis kawasan budidaya ikan, 2. Jumlah stakeholder yang mengurus Rekomendasi BBM bersubsidi. 3. Jumlah stakeholder yang mengikuti Pendampingan SHAT Pembudidayaan Ikan.

- (3) **Alokasi anggaran untuk Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.999.525,- (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 48.193.248,- (Empat Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) sisa sebesar Rp. 1.806.277,- (Satu Juta Delapan Ratus Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) atau tercapai sebesar 96,39%

Outcome program adalah Tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan meningkat)

- A. **Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.999.525,- (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 48.193.248,- (Empat Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) sisa sebesar Rp. 1.806.277,- (Satu Juta Delapan Ratus Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) atau tercapai sebesar 96,39%

Output kegiatan adalah Tingkat partisipasi pokmaswas untuk mendukung perairan sumber daya perikanan.

- a. **Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.999.525,- (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 48.193.248,- (Empat Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) sisa sebesar Rp. 1.806.277,- (Satu Juta Delapan Ratus Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) atau tercapai sebesar 96,39%

Output sub kegiatan adalah Jumlah Usaha Perikanan Tangkap yang diawasi dan terbina, (Satuan: kelompok)

- (4) **Alokasi anggaran untuk Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 475.549.800,- (Empat Ratus Tujuh Puluh

Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 180.393.300,- (Seratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 295.156.500,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 37,93%

Outcome program adalah 1. Jumlah Produksi Pengolahan hasil Perikanan. 2. Jumlah Konsumsi Ikan.

A Kegiatan Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 63.243.550,- (Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) sisa sebesar Rp. 31.756.450,- (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) atau tercapai sebesar 66,57%

Output kegiatan adalah Jumlah Kelompok Pengolah hasil perikanan yang tebina.

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 63.243.550,- (Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) sisa sebesar Rp. 31.756.450,- (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) atau tercapai sebesar 66,57%

Output sub kegiatan adalah 1. Jumlah Stakeholder yang mengikuti Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, 2. Jumlah stakeholder yang mengikuti Pendampingan pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro.

B. Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 380.549.800,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 117.149.750,- (Seratus Tujuh Belas Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) sisa sebesar Rp. 263.400.050,- (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Lima Puluh Rupiah) atau tercapai sebesar 30,78%

Output kegiatan adalah Jumlah Produksi bahan baku industri pengolahan ikan

a. Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 380.549.800,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 117.149.750,- (Seratus Tujuh Belas Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) sisa sebesar Rp. 263.400.050,- (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Lima Puluh Rupiah) atau tercapai sebesar 30,78%

Output sub kegiatan adalah 1. Jumlah lomba dan bazar gemar makan ikan yang dilaksanakan. 2. Jumlah peserta yang mengikuti FGD pengembangan pelaku usaha perikanan, 3. Bimbingan teknis peningkatan usaha perikanan, 4. Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana usaha perikanan, 5. Jumlah stakeholder yang mengikuti Pendampingan usaha kelautan dan perikanan

Dalam melaksanakan Urusan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menghadapi beberapa masalah dan solusinya, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan daerah sector perikanan dengan pelaku usaha/komoditas usaha/swasta.
2. Masih rendahnya keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal.
3. Tingkat konsumsi ikan di Masyarakat masih di bawah target nasional.
4. Belum optimalnya kualitas dan produktivitas garam rakyat.
5. Rendahnya kualitas dan kuantitas benih ikan air tawar dan payau.
6. Rendahnya kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan pembudidaya ikan dalam hal teknis budidaya ikan.
7. Tingginya harga pakan ikan pabrikan di pasaran, sehingga membutuhkan biaya operasional dalam budidaya yang tinggi.
8. Belum optimalnya pemanfaatan lahan budidaya ikan.
9. Nelayan tidak memiliki nilai tawar terhadap hasil ikan yang mereka tangkap, karena kapal, biaya bahan bakar dan logistic disediakan oleh tengkulak dengan sistem yang diatur sesuai kehendak tengkulak atau pemodal.
10. Kapal nelayan banyak yang tidak bongkar hasil tangkapan di tempat pelelangan ikan (TPI) yang berdampak pada pendapatan retribusi negara dari industry perikanan tangkap serta tidak validnya data produksi perikanan tangkap perkuartal.
11. Masih kurangnya pergantian alat tangkap ikan yang ramah lingkungan.
12. Kurangnya Aspek perlindungan/Asuransi jiwa bagi nelayan perikanan tangkap.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah melakukan solusi-solusi sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan temu usaha pelaku bisnis agar terjalinnya kemitraan.
2. Perlu adanya diversifikasi produk perikanan dan pengawasan bahan baku.
3. Perlu dilakukannya bazar, lomba dan pengiklanan lainnya tentang peran konsumsi ikan.
4. Perlu adanya peran penting pembaharuan teknologi pengolahan garam.
5. Perlu adanya balai benih ikan air tawar dan hatchery air payau.
6. Perlu ditingkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap pembudidaya ikan.
7. Perlu adanya penyediaan sarana prasarana pembuatan pakan ikan.
8. Perlu adanya pemetaan Kawasan budidaya ikan.
9. Perlu adanya fasilitasi kemitraan dengan perbangkan
10. Perlu adanya penyuluhan dan pendampingan terhadap nelayan agar melakukan pelelangan ikan di TPI
11. Perlu adanya pengadaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan
12. Perlu adanya pendampingan secara intens kepada nelayan agar didapat aspek perlindungan

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

Kode	2	3	4	5	6			8 = 7 / 6	9	10		11
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022			Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = 5+7+9	11 = 10 / 4		
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan capaian kinerja program; Satuan: Prosen	100	80	100	96,77	96,77	100	176,77	176,77		
0.00.01.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah; Satuan: Dok	12	12	12	12	100	0	36	300		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat; Daerah; Satuan: Dokumen	3		0		0	3	0	0		
0.00.01.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan; Satuan: Dok	9	3	3	3	100	0	6	66,67		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat; Daerah; Satuan: Dok	6		0		0	3	0	0		
0.00.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja; Satuan: Dok	10	5	5	4	80	0	9	90		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Satuan: Laporan	10		0		0	5	0	0		
0.00.01.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas; Satuan: Dok	6	3	3	3	100	0	6	100		

0.00.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhi/pelayanan administrasi perkantoran; Satuan: Persen	100		100		100		100		100		100		100		100		300		300
0.00.01.2 .06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor; Satuan: Jenis	366		80		80		80		4		5		80		84		84		22,95
0.00.01.2 .06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan; Satuan: Paket	160		0		0		80		0		0		0		0		0		0
0.00.01.2 .06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan; Satuan: Jenis	149		30		30		0		1		3,33		0		31		31		20,81
0.00.01.2 .06.04.	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Penyediaan jaringan web diras dan aplikasi Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan; Satuan: Unit/Aplikasi	1		0		1		0		0		0		0		0		0		0
0.00.01.2 .06.05.	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan, Kantor yang Disediakan; Satuan: Paket	2		0		0		1		0		0		1		0		0		0
0.00.01.2 .06.06.	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Kompor, Tabung Gas, Dispenser, Kulkas, Peralatan Makan dan Lain-lain; Satuan: Jenis	80		30		30		0		0		0		0		0		0		0
0.00.01.2 .06.07.	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan; Satuan: Paket	90		0		0		40		0		0		40		0		0		0
0.00.01.2 .06.08.	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Jumlah makan minum rapat dan tamu setiap bulan; Satuan: Bulan	11		11		11		0		11		100		0		22		22		200
0.00.01.2 .06.09.	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan; Satuan: Paket	22		0		0		11		0		0		11		0		0		0
0.00.01.2 .06.10.	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan; Satuan: Jenis	104		40		40		0		8		20		0		48		48		46,15
0.00.01.2 .06.11.	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan, yang Disediakan; Satuan: Paket	80		0		0		40		0		0		40		0		0		0
0.00.01.2 .06.12.	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan setiap bulan; Satuan: Bulan	12		12		12		0		12		100		0		24		24		200
0.00.01.2 .06.13.	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan; Satuan: Dok	24		0		0		12		0		0		12		0		0		0
0.00.01.2 .06.14.	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Jumlah ATK yang disediakan tiap bulan; Satuan: Bulan	12		12		12		5		41,67		0		0		17		17		141,67
0.00.01.2 .06.15.	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan; Satuan: Paket	24		0		0		12		0		0		12		0		0		0
0.00.01.2 .06.16.	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Jumlah dokumen rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam 1 tahun; Satuan: Dok	1		1		1		0		0		0		0		1		1		100

		Persentase kelompok pangan yang terkendali harganya; Satuan: Prosen	86	100	78,57	85,71	109,09	78,57	185,71	216,67
		Tingkat Keaneekaragaman Konsumsi Pangan; Satuan: Prosen	80	80,70	80	80,84	101,05	80	161,54	201,93
		Persentase ketersediaan pangan utama terhadap jumlah penduduk; Satuan: Prosen	155	155,14	0	0	0	0	155,14	100,15
		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Seger; Satuan: Prosen	80	75,56	0	0	0	0	75,56	94,45
		Stabilitas Harga Pangan (CV Harga Gabah (GK) tingkat petani); Satuan: Prosen	10	1	0	0	0	0	1	10
2.09.03.2.01.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah pangan pokok (beras) yang tersedia dan tersalurkan oleh LUPM maupun oleh daerah; Satuan: Ton/LUPM	20	20	20	20	100	20	60	300
2.09.03.2.01.01.	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Pangan.; Satuan: Dok	2	1	1	1	100	0	2	100
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Pangan.; Satuan: Dok	2	0	0	0	0	0	0	0
		Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan, Makanan; Satuan: Laporan	4	0	0	0	0	2	0	0
2.09.03.2.01.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dalam mendukung pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya; Satuan: Kalipertemuan	30	10	10	0	0	10	0	0
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan, Pangan Lainnya; Satuan: Laporan	8	0	0	0	0	4	0	0
2.09.03.2.01.04.	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Data dan informasi harga pangan pokok tingkat produsen dan pedagang tiap bulan; Satuan: bulan	20	10	10	11	110	0	21	105
		Jumlah Data dan informasi harga pangan pokok tingkat produsen dan konsumen tiap bulan; Satuan: bulan	20	0	0	0	0	0	0	0
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan; Satuan: Dok	20	0	0	0	0	10	0	0
2.09.03.2.01.05.	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan; Satuan: Kelompok	5	5	5	0	0	0	0	0

2.09.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGKAN	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota. Satuan: Laporan	20			0		10	0	0	0
		Persentase PSAT aman dikonsumsi. Satuan: Prosen	90	96,20	80	97,45	121,81	85	193,65	215,17	
		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar. Satuan: Prosen	153	151,12	0		0	0	151,12	98,56	
2.09.05.2	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah sampel yang aman. Satuan: Prosen	90	75	80	80	100	85	240	266,67	
2.09.05.2	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan. Satuan: orang	60		60	40	66,67	0	40	66,67	
		Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah, Kabupaten/Kota yang Dibina. Satuan: Dok	4		0		0	2	0	0	0
2.09.05.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang diuji. Satuan: sampel	190	342	190	32	16,84	0	374	196,84	
		Jumlah pangan yang diuji. Satuan: jenis	60		0		0	0	0	0	0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota. Satuan: Dok	4		0		0	2	0	0	0
3.25.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKAMAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap. Satuan: Ton	34.214	48.119,39	31.680	39.069	123,32	33.264	87.188,39	254,83	
3.25.03.2	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawak, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku usaha penangkapan ikan yang mendapatkan bantuan. Satuan: Orang	700	140	140	140	100	140	420	60	
3.25.03.2	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Dokumen Data dan informasi sumber daya ikan. Satuan: Dok	3		1		0	0	0	0	0
		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia. Satuan: Dokumen	2		0		0	1	0	0	0
3.25.03.2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan sarana pendukung penangkapan ikan. Satuan: Dok	14		0		0	0	0	0	0
.01.02.		Pengadaan peralatan API. Satuan: paket	10		0		0	0	0	0	0

		Pengadaan alat bantu API; Satuan: paket yang Tersedia; Satuan: Unit	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.25.03.2.01.03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah pengadaan peralatan Alat Penangkapan Ikan; Satuan: Paket	560	140	0	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah pengadaan alat bantu Alat Penangkapan Ikar; Satuan: Paket	560	140	0	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia; Satuan: Unit	560	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.25.03.2.02.	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Perikanan tangkap yang terbina; Satuan: Kelompok	322	7	8	8	100	8	23	7,14								
3.25.03.2.02.01.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang mengikuti Bimbingan teknis; Satuan: Orang	200	100	100	40	40	0	140	70								
		Jumlah nelayan yang mengikuti Sosialisasi; Satuan: Orang	400	0	200	40	20	0	40	10								
		Jumlah nelayan yang mengikuti Pembinaan; Satuan: Orang	200	30	100	80	80	0	110	55								
		Sosialisasi Peraturan Perundangan; Satuan: Orang	400		0	0	0	0	0	0								
		Pendampingan SHA T Nelayan kecil; Satuan: Orang	400		0	0	0	0	0	0								
		Pendampingan KIT Konverter; Satuan: Orang	650		0	0	0	0	0	0								
		Pendampingan Asuransi Nelayan Kecil; Satuan: Orang	2.500		0	0	0	0	0	0								
		Penerbitan Rekomendasi BBM Bersubsidi; Satuan: Orang	6.400		0	0	0	0	0	0								
		Penebitan BPKP Nelayan Kecil; Satuan: Orang	2.850		0	0	0	0	0	0								
		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya; Satuan: Orang	1.200		0	0	0	600	0	0								
3.25.03.2.02.02.	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah lembaga/kelompok nelayan kecil yang terbentuk; Satuan: Kelompok	7	7	0	7	100	0	7	100								
		Jumlah lembaga/kelompok nelayan kecil yang terbina; Satuan: Kelompok	9		9	24	266,67	0	24	266,67								
		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan, Kelembagaannya; Satuan: Kelompok	32		0	0	0	16	0	0								
3.25.03.2.02.03.	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan	Jumlah Nelayan yang mengikuti pendampingan SeHA T; Satuan: Orang	200		200	0	0	0	0	0								

		Jumlah surat pengantar surat tanda keterangan andon (STKA) bagi nelayan yang diterbitkan; Satuan: Dok	20			20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pengadaan sarana tempat pelelangan ikan; Satuan: TPI	7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pemeliharaan sarana tempat pelelangan ikan; Satuan: TPI	5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pengembangan tempat pelelangan ikan; Satuan: TPI	5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); Satuan: Layanan	13.840			0	0	0	0	6.920	0	0	0	0	0	0	0	0
3.25.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya; Satuan: Ton	45.190	38.284,07	40.990	18.512	45,16	43.040	56.796,07	125,68								
		Jumlah Produksi Pembelian Ikan; Satuan: Ton	451	443,28	440	464,85	105,65	445	908,13	201,36								
3.25.04.2	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rekomendasi Izin Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan; Satuan: Dok	19	4	4	4	100	5	13	68,42								
3.25.04.2	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Mengutamakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah stake holder yang terfasilitasi Cara Budidaya Ikan yang baik (Lahan diatas 5 Ha); Satuan: orang	8	26	4	0	0	0	26	325								
		Jumlah stake holder yang terverifikasi dan tervalidasi dalam kegiatan CBIB; Satuan: Orang	8	25	4	0	0	0	25	312,50								
		Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur Rekomendasi IUP Pembudidayaan Ikan dan Rekomendasi CBIB yang diterbitkan; Satuan: SOP	4	4	2	0	0	0	4	100								
		Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi,	2		0	0	0	1	0	0								

3.25.04.2.01.02	Pelayanan Perizinan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing; Satuan: Rekomendasi	4			4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diberikan; Satuan: Rekomendasi	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.25.04.2	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan; Satuan: Orang	Jumlah stake holder yang mengikuti Bimbingan teknis pemberian ikan; Satuan: Orang	2.826	421	620	620	100	725	1.766	62.49								
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Dempond Budaya Ikan; Satuan: Unit	8	1	4	2	50	0	3	37.50								
		Jumlah stake holder yang mengikuti Bimbingan teknis teknologi budidaya ikan air tawar dan payau; Satuan: Orang	80	0	40	0	0	0	0	0								
		Jumlah kelompok yang mengikuti Pertemuan penguatan kelembagaan kelautan dan perikanan; Satuan: Kelompok	16	0	8	3	37.50	0	3	18.75								

	Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota																		
3.25.06.01.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan, dalam Kabupaten/Kota; Satuan: Dokumen	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.25.06.2	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah Produksi Pengolahan hasil Perikanan; Satuan: Ton	11.000	6.467,94	10.000	14.590	145,90	10.500	21.057,94	191,44									
3.25.06.2	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsumsi Ikan; Satuan: Kg/kapita/Tahun	32	27,30	29,60	31,75	107,26	30,80	59,05	184,53									
3.25.06.2	Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pengolahan Hasil Perikanan; Satuan: Dok	1	1	1	1	100	1	3	300									
3.25.06.2	Perencanaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan; Satuan: Dok	2	0	1	0	0	0	0	0									
		Pertemuan penguatan kelembagaan/kelompok kelautan dan perikanan; Satuan: Orang	400	0	0	0	0	0	0	0									
		Peningkatan kelas kelompok kelautan dan perikanan; Satuan: Kelompok	25	0	0	0	0	0	0	0									
		Lomba kelompok Pelaku Utama kelautan dan perikanan; Satuan: Jenis	3	0	0	0	0	0	0	0									
		Pengembangan Aplikasi Kelembagaan dan Produksi Kelautan dan Perikanan; Satuan: Aplikasi	1	0	0	0	0	0	0	0									
3.25.06.2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko; Satuan: Dokumen	2	0	0	0	0	1	0	0									
3.25.06.2	Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok Pengolah hasil perikanan yang tebhina; Satuan: kelompok	143	7	8	8	100	8	23	16,08									
3.25.06.2	Palaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha	Jumlah Stake holder yang mengikuti Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro	400	15	200	140	70	0	155	38,75									

	Satuan: orang																			
	Bimbingan teknis peningkatan usaha perikanan; Satuan: orang	180	0	90	60	66,67	0	0	60											33,33
	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana usaha perikanan; Satuan: paket	20	0	10	0	0	0	0	0											0
	Jumlah stake holder yang mengikuti Pendampingan usaha kelautan dan perikanan; Satuan: orang	300	43	150	0	0	0	0	43											14,33
	Sosialisasi peraturan dan teknis usaha garam rakyat; Satuan: Orang	760		0		0	0	0	0											0
	Bimbingan teknis peningkatan mutu garam rakyat; Satuan: Orang	560		0		0	0	0	0											0
	Pengadaan sarana dan prasarana usaha garam rakyat; Satuan: Paket	37		0		0	0	0	0											0
	Pendampingan usaha garam rakyat; Satuan: orang	280		0		0	0	0	0											0
	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro, dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terasilitasi; Satuan: Pelaku Usaha	930		0		0	0	0	420											0

2.2 Analisis Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran pembangunan dengan indikator dan target yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2014-2019 dilihat dalam Tabel 1 dibawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

No	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target pada Akhir periode Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah					Capaian Target Renstra Perangkat Daerah				Rasio Capaian					
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.	Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi; Satuan: Poin	95	93	93,30	93,90	94,40	95	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.01.		Meningkatnya 3 (Tiga) Pilar Ketahanan Pangan	Tingkat ketersediaan Energi dan Protein; Satuan: Prosen	100	0	100	100	100	100	0	101,20	105,23	0	0	0	101,20	105,23	0	0
			Tingkat konsumsi energi dan protein; Satuan: Prosen	100	0	100	100	100	100	0	113,14	114,70	0	0	0	113,14	114,70	0	0

No	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target pada Akhir periode Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah					Capaian Target Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.02.		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Stabilitas Harga Pangan (CV. Harga Beras Tingkat Konsumen); Satuan: Prosen IKM; Satuan: Poin	10	0	10	10	10	10	0	1	1	0	0	0	90	90	100	0
1.2.	Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang lestari dan berkelanjutan	Laju pertumbuhan nilai produksi perikanan; Satuan: Prosen	28,51	8,58	11,91	19,93	24,14	28,51	0	42,10	9,77	0	0	0	353,48	49,02	0	0
1.2.01.		Meningkatnya Produksi dan Konsumsi Sumberdaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan; Satuan: Ton	90.855	447.341	74.538	83.110	87.249	90.855	0	93.314,68	72.636	0	0	0	125,19	87,40	0	0

No	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target pada periode Akhir Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah					Capaian Target Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian					
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
			Jumlah Konsumsi Ikan, Satuan: Kg/Kapita/Tahun	32	27,20	28,40	29,60	30,80	32	0	27,30	31,75	0	0	0	0	96,13	107,26	0	0

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

Kebijakan dan strategi di sektor Ketahanan Pangan dan perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi Ketahanan Pangan dan perikanan, khususnya peningkatan produksi perikanan dan konsumsi ikan. Oleh karena itu, guna mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, maka dipetakan permasalahan dalam Tabel 2.

Tabel 2
Identifikasi permasalahan teknis pada sektor Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Faktor yang mempengaruhi	
	Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (DiluarKewenangan SKPD)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Alih fungsi lahan produktif pertanian 2. Masih rendahnya posisi tawar dan pengetahuan, sikap, keterampilan pelaku utama mengenai penerapan teknologi pengolahan/ pasca panen, mutu dan keamanan pangan 3. Masih Terdapat Desa Rawan Pangan 4. Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman 5. Masih Tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras 6. Keamanan pangan yang masih memerlukan Penanganan Serious 7. Belum Optimalnya Pelaporan sistem Kewaspadaan pangan dan gizi 8. Tingginya harga pakan diimbangi harga jual hasil produksi 9. Sering terjadinya kekeringan dan banjir 10. Masih lemahnya informasi pasar dan cara budidaya ikan yang baik 11. Ancaman abrasi pantai dan pendangkalan/sedimentasi sungai dan saluran irigasi yang sangat tinggi 12. Kualitas air rendah terutama di tambak 13. Pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengawas masih belum optimal 14. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan bidang perikanan di tingkat masyarakat 15. Akses perbankan yang rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga penyuluh tidak dalam satu lingkungan mengakibatkan sulitnya koordinasi 2. Masih terbatasnya tenaga teknis 3. Kurangnya Koordinasi dan Konsolidasi dengan pihak terkait 4. Minimnya kebijakan daerah yang memumpuni dalam beberapa sektor 5. Terbatasnya anggaran daerah dalam menangani beberapa masalah yang dihadapi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penerapan teknologi unggul tepat guna, spesifiklokasi, efisien, dan ramah lingkungan baik pada tahapan praproduksi, produksi, penanganan hasil dan pasca panen. 2. Paket teknologi yang diterapkan Sebagian besar masih bersifat rekomendasi umum.

2.4 Riview terhadap Rancangan Awal RKPD

Sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan yang diambil, ditetapkan 1 Program Non Urusan (8 Kegiatan dan 23 sub kegiatan), pada sektor ketahanan pangan 4 Program (7 Kegiatan dan 15 sub kegiatan) dan sektor Perikanan 4 Program (9 Kegiatan dan 12 sub kegiatan) yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Adapun penjelasannya dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Keb. Dana
0	NON URUSAN				7.901.124.500	NON URUSAN				7.901.124.500
0.00.	NON BIDANG URUSAN				7.901.124.500	NON BIDANG URUSAN				7.901.124.500
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan capaian kinerja program	100 Prosen	7.901.124.500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan capaian kinerja program	100 Prosen	7.901.124.500
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	416.834.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	416.834.800
0.00.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	202.113.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	202.113.100
0.00.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.870.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.870.200
0.00.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	163.851.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	163.851.500
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Peleaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 Persen	6.019.076.500	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Peleaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 Persen	6.019.076.500
0.00.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	5.957.005.800	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	5.957.005.800
0.00.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	-
0.00.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	1 Laporan	31.007.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	31.007.800

No	Rencana Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Keb. Dana		
0.00.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	31.062.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	31.062.900		
0.00.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terperuhinya jasa pengamanan dan kebersihan milik daerah	1 Tahun	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terperuhinya jasa pengamanan dan kebersihan milik daerah	1 Tahun	-		
0.00.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	-		
0.00.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang terpenuhi kelengkapannya	130 pegawai	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang terpenuhi kelengkapannya	130 pegawai	-		
0.00.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelengkapan	130 Paket	-	Pengadaan Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelengkapan	130 Paket	-		
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terperuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	349.934.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terperuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	349.934.400		
0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	80 Paket	5.019.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	80 Paket	5.019.300		
0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	62.504.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	62.504.600		
0.00.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	-		
0.00.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	51.075.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	51.075.000		
0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Barang	40 Paket	35.352.000	Penyediaan Barang	Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Barang Cetak dan	40 Paket	35.352.000		

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Keb. Dana
	Pengandaan	Cirebon	Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan			Cetakan dan Pengandaan	Cirebon	Cetakandan Pengandaan yang Disediakan		
0.00.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	16.300.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	16.300.000
0.00.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	134.522.000	Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	134.522.000
0.00.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	45.161.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	45.161.500
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintah Daerah		Terpenuhinya fasilitas dan peralatan kerja sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah	40 Unit	61.700.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya fasilitas dan peralatan kerja sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah	40 Unit	61.700.000
0.00.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunanLainnya	Kabupaten Cirebon	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit	61.700.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Kabupaten Cirebon	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunanlainnya yang Disediakan	40 Unit	61.700.000
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Kantor	100 Persen	250.980.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya Jasa PenunjangUrusan Kantor	100 Persen	250.980.800
0.00.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	228.730.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	228.730.800
0.00.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	130 Laporan	22.250.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	130 Laporan	22.250.000
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	802.598.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	802.598.000
0.00.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Kabupaten Cirebon	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80 Unit	150.602.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Kabupaten Cirebon	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan	80 Unit	150.602.500

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Keb. Dana
0.00.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	80 Unit	134.020.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	80 Unit	134.020.000
0.00.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Cirebon	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	517.975.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Cirebon	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	517.975.500
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.133.375.300	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.133.375.300
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				1.133.375.300	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				1.133.375.300
2.09.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Persentase LPM yang dimandirikan	4,08 Prosen	-	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Persentase LPM yang dimandirikan	4,08 Prosen	-
2.09.02.2.01.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dapat mendukung tercapainya kemandirian pangan	10 Unit/LPM	-	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dapat mendukung tercapainya kemandirian pangan	10 Unit/LPM	-
2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	80 unit	-	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	80 unit	-
2.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Persentase ketersediaan pangan terhadap jumlah kebutuhan pangan	159,84 Prosen	256.664.800	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN		Persentase ketersediaan pangan terhadap jumlah kebutuhan pangan	159,84 Prosen	256.664.800

Rencana Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Keb. Dana	
			Persentase kelompok pangan yang terkendali harganya	85,71 Prosen	392.547.700	MASYARAKAT		Persentase kelompok pangan yang terkendali harganya	85,71 Prosen	392.547.700	
			Tingkat Keaneekaragaman Konsumsi Pangan	80 Prosen	190.708.400			Tingkat Keaneekaragaman Konsumsi Pangan	80 Prosen	190.708.400	
2.09.03.2.01.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan		Jumlah pangan pokok (beras) yang tersedia dan tersalurkan oleh LUPM maupun oleh daerah	20 Ton/LUPM	392.547.700	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan		Jumlah pangan pokok (beras) yang tersedia dan tersalurkan oleh LUPM maupun oleh daerah	20 Ton/LUPM	392.547.700	
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kabupaten Cirebon	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	10 Laporan	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kabupaten Cirebon	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	10 Laporan	-	
2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kabupaten Cirebon	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	3 Unit	122.345.400	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kabupaten Cirebon	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	3 Unit	122.345.400	
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	3 Unit	-	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	3 Unit	-	
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	2 Laporan	95.708.700	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	2 Laporan	95.708.700	
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Kabupaten Cirebon	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	10 Laporan	174.493.600	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Kabupaten Cirebon	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	10 Laporan	174.493.600	
2.09.03.2.02.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah stock gabah di kab. Cirebon	400 ton GKG	256.664.800	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah stock gabah di kab. Cirebon	400 ton GKG	256.664.800	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan	Kabupaten	Jumlah Cadangan Pangan	229,6 Ton	236.550.000	Pengadaan Cadangan	Kabupaten	Jumlah Cadangan Pangan	229,6 Ton	236.550.000	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Keb. Dana
2.09.03.2.02.0006	Pemerintah Kabupaten/Kota Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Cirebon Kabupaten Cirebon	Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	4 Ton	20.114.800	Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Cirebon Kabupaten Cirebon	Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	4 Ton	20.114.800
2.09.03.2.04.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Jumlah kelompok / jenis pangan yang kecukupan gizinya memenuhi target	4 Dok	190.708.400	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Jumlah kelompok / jenis pangan yang kecukupan gizinya memenuhi target	4 Dok	190.708.400
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kabupaten Cirebon	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	36.012.600	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kabupaten Cirebon	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	36.012.600
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kabupaten Cirebon	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	114.696.800	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kabupaten Cirebon	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	114.696.800
2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kabupaten Cirebon	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	12 Laporan	40.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kabupaten Cirebon	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	12 Laporan	40.000.000
2.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWAMAN PANGAN		Berkurangnya daerah rawan pangan	13 Daerah/Desa	96.124.600	PROGRAM PENANGANAN KERAWAMAN PANGAN		Berkurangnya daerah rawan pangan	13 Daerah/Desa	96.124.600
2.09.04.2.01.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Jumlah Dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan	1 Dok	39.755.400	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Jumlah Dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan	1 Dok	39.755.400
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kabupaten Cirebon	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhiran	1 Dokumen	39.755.400	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kabupaten Cirebon	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhiran	1 Dokumen	39.755.400
2.09.04.2.02.	Penanganan Kerawaman Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Desa Rawan Pangan yang dilangani	20 Desa	56.369.200	Penanganan Kerawaman Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Desa Rawan Pangan yang dilangani	20 Desa	56.369.200
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawaman Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawaman pangan dan gizi	10 Laporan	56.369.200	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawaman Pangan dan Gizi	Kabupaten Cirebon	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawaman pangan dan gizi	10 Laporan	56.369.200

Rencana Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Keb. Dana	
2.09.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		kabupaten/kota			Kabupaten/kota					
2.09.05.2.01.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/kota		Prosentase jumlah sampel yang aman	90 Prosen	197.329.800	KEAMANAN PANGAN		Persentase PSAT aman dikonsumsi	90 Prosen	197.329.800	
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2 Dokumen	86.987.700	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2 Dokumen	86.987.700	
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kabupaten Cirebon	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2 Dokumen	110.342.100	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kabupaten Cirebon	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2 Dokumen	110.342.100	
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				15.186.237.700	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				15.186.237.700	
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				15.186.237.700	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				15.186.237.700	
3.25.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	34.214 Ton	9.346.253.100	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	34.214 Ton	9.346.253.100	
3.25.03.2.01.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Pelaku usaha penangkapan ikan yang mendapatkan bantuan	140 Orang	-	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Pelaku usaha penangkapan ikan yang mendapatkan bantuan	140 Orang	-	
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/kota yang Tersedia	1 Dokumen	-	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/kota yang Tersedia	1 Dokumen	-	
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kabupaten Cirebon	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	140 Unit	-	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	140 Unit	-	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Keb. Dana
3.25.03.2.02.	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terjamin dan Tersedia Jumlah Kelompok Perikanan tangkap yang terbina	8 Kelompok	7.534.696.000	Tangkap Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terjamin dan Tersedia Jumlah Kelompok Perikanan tangkap yang terbina	8 Kelompok	7.534.696.000
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kabupaten Cirebon	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	600 Orang	7.484.696.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kabupaten Cirebon	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	600 Orang	7.484.696.000
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kabupaten Cirebon	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	16 Kelompok	50.000.000	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kabupaten Cirebon	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	16 Kelompok	50.000.000
3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kabupaten Cirebon	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	2.450 Unit Usaha	-	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kabupaten Cirebon	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	2.450 Unit Usaha	-
3.25.03.2.03.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah Tempat pelelangan ikan yang beroperasi	7 TPI	1.811.557.100	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah Tempat pelelangan ikan yang beroperasi	7 TPI	1.811.557.100
3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kabupaten Cirebon	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	350 Dokumen	34.731.300	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kabupaten Cirebon	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	350 Dokumen	34.731.300
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kabupaten Cirebon	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	6.920 Layanan	1.776.825.800	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kabupaten Cirebon	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	6.920 Layanan	1.776.825.800
3.25.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	45.190 Ton	1.085.785.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	45.190 Ton	1.085.785.000
			Jumlah Produksi Pembenhian Ikan	451 Ton	3.424.503.900			Jumlah Produksi Pembenhian Ikan	451 Ton	3.424.503.900
3.25.04.2.01.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Rekomendasi Izin Pembudidaya Ikan yang diterbitkan	6 Dok	64.848.000	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Rekomendasi Izin Pembudidaya Ikan yang diterbitkan	6 Dok	64.848.000
3.25.04.2.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha	Kabupaten Cirebon	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur	1 Rekomend	64.848.000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur	1 Rekomend	64.848.000

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Keb. Dana
	Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	asi		Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	asi	
3.25.04.2.02.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	870 Orang	771.393.000	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	870 Orang	771.393.000
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	24 Kelompok	771.393.000	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	24 Kelompok	771.393.000
3.25.04.2.03.	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPiK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		Jumlah Dokumen TDPiK yang diterbitkan	25 Dok	-	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPiK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		Jumlah Dokumen TDPiK yang diterbitkan	25 Dok	-
3.25.04.2.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPiK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	25 Rekomendasi	-	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPiK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	25 Rekomendasi	-
3.25.04.2.04.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah pembenih dan pembudidaya ikan yang terbina	810 Orang	3.674.047.900	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah pembenih dan pembudidaya ikan yang terbina	810 Orang	3.674.047.900

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Keb. Dana
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit	3.085.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit	3.085.000.000
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit	339.503.900	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit	339.503.900
3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kabupaten Cirebon	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	260 Orang	142.952.900	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kabupaten Cirebon	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	260 Orang	142.952.900
3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemantauan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kabupaten Cirebon	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	5 Ha	106.591.100	Perencanaan, Pengembangan, Pemantauan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kabupaten Cirebon	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	5 Ha	106.591.100
3.25.05.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3.25.05.2.01.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		Tingkat partisipasi pokmaswas untuk mendukung perairan sumberdaya perikanan	10 kelompok	-	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		Tingkat partisipasi pokmaswas untuk mendukung perairan sumberdaya perikanan	10 kelompok	-
3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	-	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	-

No	Rencana Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Keb. Dana
3.25.06.2.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	-	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	-
3.25.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Jumlah Produksi Pengolahan hasil Perikanan	11.000 Ton	1.249.999.900	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Jumlah Produksi Pengolahan hasil Perikanan	11.000 Ton	1.249.999.900
			Jumlah Konsumsi Ikan	32 Kg/kapital/ Tahun	79.695.800			Jumlah Konsumsi Ikan	32 Kg/kapital/ Tahun	79.695.800
3.25.06.2.01.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pengolah hasil Perikanan	1 Dok	-	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pengolah hasil Perikanan	1 Dok	-
3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	-	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	-
3.25.06.2.02.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Kelompok Pengolah hasil perikanan yang tebina	8 kelompok	79.695.800	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Kelompok Pengolah hasil perikanan yang tebina	8 kelompok	79.695.800
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kabupaten Cirebon	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai	400 Unit Usaha	79.695.800	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kabupaten Cirebon	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	400 Unit Usaha	79.695.800

Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lok	Indikator Kinerja	Target Capaian	Keb. Dana
3.25.06.2.03.	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Skala Usaha dan Risiko Jumlah Produksi bahan baku industri pengolahan ikan	11.000 Ton	1.249.999.900	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Produksi bahan baku industri pengolahan ikan	11.000 Ton	1.249.999.900
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terasiliasi	510 Pelaku Usaha	1.249.999.900	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terasiliasi	510 Pelaku Usaha	1.249.999.900

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan dinas teknis yang peranannya sangat penting sebagai perumus pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan dan Perikanan, dimana Ketahanan Pangan dan Perikanan sangat menunjang dalam peningkatan perekonomian masyarakat dan diupayakan pembudidaya ikan, para nelayan masyarakat pesisir sehingga dapat meningkatkan produksi perikanan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan
0,	NON URUSAN				
0.00.	NON BIDANG URUSAN				
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan capaian kinerja program	100 Prosen	
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat, Daerah	3 Dokumen	
0.00.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	
0.00.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	
0.00.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 Persen	
0.00.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	
0.00.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	
0.00.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
0.00.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	
0.00.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terpenuhinya Jasa pengemanan dan kebersihan milik daerah	1 Tahun	
0.00.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	
0.00.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang terpenuhi kelengkapannya	130 pegawai	
0.00.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	130 Paket	
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	
0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	80 Paket	
0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
0.00.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	
0.00.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	
0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan
0.00.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	
0.00.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Cirebon	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	
0.00.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya fasilitas dan peralatan kerja sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah	40 Unit	
0.00.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Kabupaten Cirebon	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit	
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya Jasa PenunjangUrusan Kantor	100 Persen	
0.00.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
0.00.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	130 Laporan	
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	
0.00.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	80 Unit	
0.00.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	
0.00.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Cirebon	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	
2,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
2.09.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Persentase LPM yang dimandirikan	4,08 Persen	
2.09.02.2.01.	Penyediaan Infrastruktur dan SeluruhPendukungKemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dapat mendukung tercapainya kemandirian pangan	10 Unit/LPM	
2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan PemerintahKabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	80 unit	
2.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Persentase ketersediaan pangan terhadap jumlah kebutuhan pangan	159,84 Persen	
			Persentasekelompokpangan yang terkendaliharganya	85,71 Persen	
			Tingkat KeanekaragamanKonsumsi Pangan	80 Persen	
2.09.03.2.01.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokokatau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka StabilisasiPasokan dan Harga Pangan		Jumlah pangan pokok (beras) yang tersedia dan tersalurkan oleh LUPM maupun oleh daerah	20 Ton/LUPM	
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kabupaten Cirebon	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	10 Laporan	
2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kabupaten Cirebon	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	3 Unit	
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	3 Unit	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	2 Laporan	
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Kabupaten Cirebon	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	10 Laporan	
2.09.03.2.02.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah stock gabah di kab. Cirebon	400 ton GKG	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	229,6 Ton	
2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	4 Ton	
2.09.03.2.04.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Jumlah kelompok / jenis pangan yang kecukupan gizinya memenuhi target	4 Dok	
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kabupaten Cirebon	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kabupaten Cirebon	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	
2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kabupaten Cirebon	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	12 Laporan	
2.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Berkurangnya daerah rawan pangan	13 Daerah/Desa	
2.09.04.2.01.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Jumlah Dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan	1 Dok	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kabupaten Cirebon	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	
2.09.04.2.02.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Desa Rawan Pangan yang ditangani	20 Desa	
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	10 Laporan	
2.09.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase PSAT amandikonsumsi	90 Prosen	
2.09.05.2.01.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Presentase jumlah sampel yang aman	90 Prosen	
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2 Dokumen	
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kabupaten Cirebon	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2 Dokumen	
3,	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3.25.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	34.214 Ton	
3.25.03.2.01.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Pelaku usaha penangkapan ikan yang mendapatkan bantuan	140 Orang	
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kabupaten Cirebon	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	140 Unit	
3.25.03.2.02.	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam		Jumlah Kelompok Perikanan tangkap	8 Kelompok	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan
	Daerah Kabupaten/Kota		yang terbina		
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	kabupaten Cirebon	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	600 Orang	
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kabupaten Cirebon	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	16 Kelompok	
3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kabupaten Cirebon	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	2.450 Unit Usaha	
3.25.03.2.03.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah Tempat pelelangan ikan yang beroperasi	7 TPI	
3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kabupaten Cirebon	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	350 Dokumen	
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kabupaten Cirebon	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	6.920 Layanan	
3.25.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	45.190 Ton	
			Jumlah Produksi Pembenihan Ikan	451 Ton	
3.25.04.2.01.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Rekomendasi Izin Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan	6 Dok	
3.25.04.2.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Kabupaten Cirebon	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1 Rekomendasi	
3.25.04.2.02.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	870 Orang	
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	24 Kelompok	
3.25.04.2.03.	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		Jumlah Dokumen TDPIK yang diterbitkan	25 Dok	
3.25.04.2.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	25 Rekomendasi	
3.25.04.2.04.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah pembenih dan pembudidaya ikan yang terbina	810 Orang	
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit	
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit	
3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kabupaten Cirebon	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	260 Orang	
3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kabupaten Cirebon	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	5 Ha	
3.25.05.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN		Tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan	1,96 Persen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan
	PERIKANAN				
3.25.05.2.01.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		Tingkat partisipasi pokmaswas untuk mendukung perairan sumber daya perikanan	10 kelompok	
3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha PerikananTangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya PerikananTangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	
3.25.05.2.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	
3.25.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Jumlah Produksi Pengolahan hasil Perikanan	11.000 Ton	
			Jumlah Konsumsi Ikan	32 Kg/Kapita/Tahun	
3.25.06.2.01.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pengolah hasil Perikanan	1 Dok	
3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	
3.25.06.2.02.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Kelompok Pengolah hasil perikanan yang tebina	8 kelompok	
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kabupaten Cirebon	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	400 Unit Usaha	
3.25.06.2.03.	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Produksi bahan baku industri pengolahan ikan	11.000 Ton	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	510 Pelaku Usaha	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 sehingga menjadi sangat penting. Sesuai dengan RPJPN 2005 - 2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020 - 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Visi pembangunan dalam RPJMN 2020 - 2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Agenda Prioritas yaitu : 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan. 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Berdasarkan rincian dari Tujuh Agenda Prioritas tersebut, maka Ketahanan Pangan tercakup dalam Agenda Prioritas yang pertama, yaitu "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan", melalui "pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan".

PERIKANAN

Acuan kebijakan yang digunakan adalah 1) UU RI Nomor 32/2015 tentang Kelautan, 2) UU RI Nomor 31/2004 JUNTO UU RI Nomor 45/2009 tentang Perikanan, 3) PERPRES NOMOR. 16 TAHUN 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Prinsip dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah Wawasan Nusantara, Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Biru, Pengelolaan Terintegrasi dan Transparansi, Partisipasi dan Pemerataan dan Kesetaraan. Dalam implementasi laut sebagai masa depan bangsa, maka ditetapkan pengelolaan laut harus berazaskan 1) kedaulatan (*sovereignty*), 2) Keberlanjutan (*sustainability*) dan 3) Kesejahteraan (*prosperity*). Berikut berbagai kebijakan kelautan yang telah ditempuh dalam rangka merealisasi Indonesia sebagai poros maritim.



Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas: a. manfaat; b. keadilan; c. kebersamaan; d. kemitraan; e. kemandirian; f. pemerataan; g. keterpaduan; h. keterbukaan; i. efisiensi; j. kelestarian; dan k. pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan: a. rencana pengelolaan perikanan; b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; j. pelabuhan perikanan; k. sistem pemantauan kapal perikanan; l. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan; m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya; n. pembudidayaan ikan dan perlindungannya; o. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; p. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya; q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; r. kawasan konservasi perairan; s. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan u. jenis ikan yang dilindungi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan

1. Meningkatkan ketahanan pangan daerah;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang lestari dan berkelanjutan

Sasaran

1. Meningkatnya 3 (Tiga) Pilar Ketahanan Pangan
2. Meningkatnya Produksi dan Konsumsi Sumber daya Perikanan
3. Meningkatnya Produksi dan Konsumsi Sumber daya Perikanan
4. Meningkatnya Kuantitas Pelayanan Publik

3.3 Program, Kegiatan dan sub kegiatan

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon menetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Paguindikatif	Asal Ajuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Paguindikatif
0,	NON URUSAN				7.901.124.500			18.916.000.000
0.00.	NON BIDANG URUSAN				7.901.124.500			18.916.000.000
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NIKOTA				7.901.124.500	100 Persen		18.916.000.000
0.00.01.2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan capaian kinerja program			416.834.800	3 Dokumen	3 Dokumen	1.100.000.000
0.00.01.2.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			202.113.100	3 Dokumen	3 Dokumen	450.000.000
0.00.01.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Cirebon		50.870.200	5 Laporan	5 Laporan	300.000.000
0.00.01.2.0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Cirebon		163.851.500	3 Laporan	3 Laporan	350.000.000
0.00.01.2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah			6.019.076.500	100 Persen	100 Persen	11.821.000.000
0.00.01.2.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon		5.957.005.800	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	11.661.000.000
0.00.01.2.0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Cirebon		-	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif
0.00.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Laporan	31.007.800	PIS	1 Laporan	70.000.000	
0.00.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Laporan	31.062.900	PIS	1 Laporan	70.000.000	
0.00.01.2.0 3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jasa pengemaman dan kebersihan milik daerah	Kabupaten Cirebon	1 Tahun	-	PIS	1 Tahun	350.000.000	
0.00.01.2.0 3.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Cirebon	12 Dokumen	-		12 Dokumen	350.000.000	
0.00.01.2.0 5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang terpenuhi kelengkapannya		130 pegawai	-	PIS	130 pegawai	200.000.000	
0.00.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Cirebon	130 Paket	-		130 Paket	200.000.000	
0.00.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		100 Persen	349.934.400	PIS	100 Persen	1.930.000.000	
0.00.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	80 Paket	5.019.300	PIS	80 Paket	150.000.000	
0.00.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	1 Paket	62.504.600	PIS	1 Paket	350.000.000	
0.00.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	50 Paket	-		50 Paket	100.000.000	
0.00.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	11 Paket	51.075.000	PIS	11 Paket	350.000.000	
0.00.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	40 Paket	35.352.000	PIS	40 Paket	200.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif	Asal Ajuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif
0.00.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	12 Dokumen	16.300.000	PIS	12 Dokumen	80.000.000
0.00.01.2.0 6.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	12 Paket	134.522.000	PIS	12 Paket	300.000.000
0.00.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Laporan	45.161.500	PIS	1 Laporan	400.000.000
0.00.01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya fasilitas dan peralatan kerja sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah		40 Unit	61.700.000	PIS	40 Unit	250.000.000
0.00.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	40 Unit	61.700.000	PIS	40 Unit	250.000.000
0.00.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Kantor		100 Persen	250.980.800	PIS	100 Persen	530.000.000
0.00.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	12 Laporan	228.730.800	PIS	12 Laporan	400.000.000
0.00.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	130 Laporan	22.250.000	PIS	130 Laporan	130.000.000
0.00.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100 Prosen	802.598.000	PIS	100 Persen	2.735.000.000
0.00.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Cirebon	80 Unit	150.602.500	PIS	80 Unit	545.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif		Asal Ajuan	Target Capaian Kinerja
0.00.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Cirebon	80 Unit	134.020.000		PIS	80 Unit 300.000.000
0.00.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Cirebon	2 Unit	517.975.500		PIS	2 Unit 1.890.000.000
2,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.133.375.300			12.641.408.390
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				1.133.375.300			12.641.408.390
2.09.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase LPM yang dimandirikan		4,08 Persen	-			4,08 Persen 2.900.000.000
2.09.02.2.0 1.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dapat mendukung tercapainya kemandirian pangan		10 Unit/LPM	-		Ban prov, DAK, PIS	10 Unit/LPM 2.900.000.000
2.09.02.2.0 1.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	Kabupaten Cirebon	80 unit	-			80 unit 2.900.000.000
2.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan Terhadap jumlah kebutuhan pangan		159,84 Persen	256.664.800			159,84 Persen 2.350.000.000
		Persentase kelompok pangan yang terkendali harganya		85,71 Prosen	392.547.700			85,71 Persen 1.700.000.000
		Tingkat KeanekaragamanKonsumsi Pangan		80 Prosen	190.708.400			80 Prosen 2.925.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif	Asal Ajuan	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
2.09.03.2.0 1.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlahpanganpokok (beras) yang tersedia dan tersalurkan oleh LUPM maupun oleh daerah		20 Ton/LUPM	392.547.700	PIS	20 Ton/LUPM	1.700.000.000
2.09.03.2.0 1.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kabupaten Cirebon	10 Laporan	-		10 Laporan	200.000.000
2.09.03.2.0 1.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Kabupaten Cirebon	3 Unit	122.345.400	PIS	3 Unit	700.000.000
2.09.03.2.0 1.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	JumlahKelembagaanDistribusi Pangan	Kabupaten Cirebon	3 Unit	-		3 Unit	200.000.000
2.09.03.2.0 1.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	2 Laporan	95.708.700	PIS	2 Laporan	300.000.000
2.09.03.2.0 1.0014	Koordinasi dan SinkronisasiPemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan PokokStrategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Kabupaten Cirebon	10 Laporan	174.493.600	PIS	10 Laporan	300.000.000
2.09.03.2.0 2.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah stock gabah di kab. Cirebon		400 ton GKG	256.664.800	PIS	400 ton GKG	2.350.000.000
2.09.03.2.0 2.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	229,6 Ton	236.550.000	PIS	229,6 Ton	2.000.000.000
2.09.03.2.0 2.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	Kabupaten Cirebon	4 Ton	20.114.800	PIS	4 Ton	350.000.000
2.09.03.2.0 4.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah kelompok / jenis pangan yang kecukupan gizinya memenuhi target		4 Dok	190.708.400	PIS	4 Dok	2.925.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif
2.09.03.2.0 4.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	36.012.600	PIS	1 Dokumen	250.000.000	
2.09.03.2.0 4.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kabupaten Cirebon	2 Laporan	114.695.800	PIS	2 Laporan	2.475.000.000	
2.09.03.2.0 4.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kabupaten Cirebon	12 Laporan	40.000.000	PIS	12 Laporan	200.000.000	
2.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Berkurangnya daerah rawan pangan		13 Daerah/Desa	96.124.600		13 Daerah/Desa	1.216.408.390	
2.09.04.2.0 1.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan		1 Dok	39.755.400	PIS	1 Dok	400.000.000	
2.09.04.2.0 1.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	39.755.400	PIS	1 Dokumen	400.000.000	
2.09.04.2.0 2.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Rawan Pangan yang ditangani		20 Desa	56.369.200	PIS	20 Desa	816.408.390	
2.09.04.2.0 2.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Kabupaten Cirebon	10 Laporan	56.369.200	PIS	10 Laporan	816.408.390	
2.09.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT aman dikonsumsi		90 Persen	197.329.800		90 Persen	1.550.000.000	
2.09.05.2.0 1.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampel yang aman		90 Persen	197.329.800	PIS	90 Persen	1.550.000.000	
2.09.05.2.0 1.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Kabupaten Cirebon	2 Dokumen	86.987.700	PIS	2 Dokumen	1.200.000.000	
2.09.05.2.0 1.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutupangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutupangan segar asal tumbuhan	Kabupaten Cirebon	2 Dokuman	110.342.100	PIS	2 Dokuman	350.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif	Asal Ajuan	Target Capaian Kinerja
3,	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				15.186.237.700		53.873.092.600
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				15.186.237.700		53.873.092.600
3.25.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		34.214 Ton	9.346.253.100		24.723.450.000
3.25.03.2.0	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku usaha penangkapan ikan yang mendapatkan bantuan		140 Orang	-	PIS	5.793.200.000
3.25.03.2.0	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	-		250.000.000
3.25.03.2.0	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha PerikananTangkap	Jumlah Sarana Usaha PerikananTangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kabupaten Cirebon	140 Unit	-		5.543.200.000
3.25.03.2.0	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Perikanan tangkap yang terbina		8 Kelompok	7.534.696.000	DAK, PIS	9.480.250.000
3.25.03.2.0	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	kabupaten Cirebon	600 Orang	7.484.696.000	DAK, PIS	8.500.000.000
3.25.03.2.0	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kabupaten Cirebon	16 Kelompok	50.000.000	PIS	380.250.000
3.25.03.2.0	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kabupaten Cirebon	2.450 Unit Usaha	-		600.000.000
3.25.03.2.0	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Tempat pelelangan ikan yang beroperasi		7 TPI	1.811.557.100	PIS	9.450.000.000
3.25.03.2.0	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kabupaten Cirebon	350 Dokumen	34.731.300	PIS	700.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif
3.25.03.2.0 3.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kabupaten Cirebon	6.920 Layanan	1.776.825.800	DAK, PIS	6.920 Layanan	8.750.000.000	
3.25.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		45.190 Ton	1.085.785.000		45.190 Ton	8.109.348.600	
		Jumlah Produksi Pembenihan Ikan		451 Ton	3.424.503.900		451 Ton	11.277.500.000	
3.25.04.2.0 1.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rekomendasi Izin Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan		6 Dok	64.848.000	PIS	6 Dok	75.000.000	
3.25.04.2.0 1.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Kabupaten Cirebon	1 Rekomendasi	64.848.000	PIS	1 Rekomendasi	75.000.000	
3.25.04.2.0 2.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan		870 Orang	771.393.000	Banpro v, DAK, PIK, PIS, Pokir DPRD	870 Orang	4.850.000.000	
3.25.04.2.0 2.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Cirebon	24 Kelompok	771.393.000	DAK, PIK, PIS, Pokir DPRD	24 Kelompok	4.850.000.000	
3.25.04.2.0 3.	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen TDPIK yang diterbitkan		25 Dok	-	PIS	25 Dok	375.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Paguindikatif	Asal Ajuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Paguindikatif
3.25.04.2.0 3.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kabupaten Cirebon	25 Rekomendasi	-		25 Rekomendasi	375.000.000
3.25.04.2.0 4.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembenih dan pembudidaya ikan yang terbina		810 Orang	3.674.047.900	DAK, PIS	810 Orang	14.086.848.600
3.25.04.2.0 4.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	25 Unit	3.085.000.000	DAK, PIS	25 Unit	9.327.500.000
3.25.04.2.0 4.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	6 Unit	339.503.900	DAK, PIS	6 Unit	1.950.000.000
3.25.04.2.0 4.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kabupaten Cirebon	260 Orang	142.952.900	PIS	260 Orang	259.348.600
3.25.04.2.0 4.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Kabupaten Cirebon	5 Ha	106.591.100	PIS	5 Ha	2.550.000.000
3.25.05.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan		1,96 Prosen	-		1,96 Prosen	215.000.000
3.25.05.2.0 1.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pokmaswas untuk mendukung perairan sumber daya perikanan		10 kelompok	-	PIS	10 kelompok	215.000.000
3.25.05.2.0 1.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	4 Dokumen	-		4 Dokumen	135.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif
3.25.05.2.0 1.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	5 Dokumen	-		5 Dokumen	80.000.000	
3.25.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan hasil Perikanan		11.000 Ton	1.249.999.900		11.000 Ton	8.812.794.000	
		Jumlah Konsumsi Ikan		32 Kg/Kapita/Tahun	79.695.800		32 Kg/Kapita/Tahun	735.000.000	
3.25.06.2.0 1.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pengolah hasil Perikanan		1 Dok	-	PIS	1 Dok	190.000.000	
3.25.06.2.0 1.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	-		1 Dokumen	190.000.000	
3.25.06.2.0 2.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok Pengolah hasil perikanan yang tebina		8 kelompok	79.695.800	PIS	8 kelompok	545.000.000	
3.25.06.2.0 2.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Ternadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kabupaten Cirebon	400 Unit Usaha	79.695.800	PIS	400 Unit Usaha	545.000.000	
3.25.06.2.0 3.	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi bahan baku industri pengolahan ikan		11.000 Ton	1.249.999.900	DAK, PIS	11.000 Ton	8.812.794.000	
3.25.06.2.0 3.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kabupaten Cirebon	510 Pelaku Usaha	1.249.999.900	DAK, PIS	510 Pelaku Usaha	8.812.794.000	
J U M L A H					24.220.737.500			85.430.500.990	

Rencana Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 dan Perbandingan Tahun sebelumnya
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

NO	URAIAN	EVALUASI										RENCANA	
		2020		2021		2022		2023		2024		2023	2024
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target		
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) :	178.640.000	168.324.846	94,23	171.900.000	139.379.000	81,08	176.405.000	133.017.500	75,40	191.585.000	202.585.000	
1.1	RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN	77.640.000	67.324.846	86,71	87.080.000	75.059.000	86,20	88.580.000	83.412.500	94,17	88.580.000	91.580.000	
	TPI Gebang Mekar	27.480.000	22.338.246	81,29	32.480.000	10.569.500	32,54	-	-	-	-	-	
	TPI Bungko Lor							10.000.000	3.750.000	37,50	10.000.000	10.000.000	
	TPI Bondet	25.080.000	26.900.000	107,26	29.520.000	30.000.000	101,63	53.000.000	58.089.500	109,60	53.000.000	56.580.000	
	TPI Karangreja	25.080.000	18.086.600	72,12	25.080.000	34.489.500	137,52	25.580.000	21.573.000	84,34	25.580.000	27.000.000	
1.2	PENJUALAN HASIL PERIKANAN	101.000.000	101.000.000	100	84.820.000	64.320.000	75,83	87.825.000	49.605.000	56,48	103.005.000	111.005.000	
	UPTD Benih Ikan (BBI): nila, mas	50.000.000	50.000.000	100	33.820.000	33.820.000	100	35.820.000	36.505.000	101,91	51.000.000	56.000.000	
	Tambak Dinas: Ambulu (bandeng)	51.000.000	51.000.000	100	51.000.000	30.500.000	59,80	52.005.000	13.100.000	25,19	52.005.000	55.005.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasannya Pembagian kewenangan Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dibagi sesuai dengan kapasitas teritorial kerja dan potensi kinerja Sumber daya masing-masing pemangku kepentingan, dari hal tersebut Pemerintah Daerah khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon mempunyai kewenangan yang tertuang pada Tabel 5 dibawah, antara lain :

Tabel 4.1
Tabel Kewenangan Urusan Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan
0,	NON URUSAN			7.901.124.500	
0.00.	NON BIDANG URUSAN			7.901.124.500	
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan capaian kinerja program	100 Prosen	7.901.124.500	
0.00.01.2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat, Daerah	3 Dokumen	416.834.800	PIS
0.00.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	202.113.100	PIS
0.00.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.870.200	PIS
0.00.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	163.851.500	PIS
0.00.01.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 Persen	6.019.076.500	PIS
0.00.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	5.957.005.800	PIS
0.00.01.2.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	-	
0.00.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	31.007.800	PIS
0.00.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	1 Laporan	31.062.900	PIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan
0.00.01.2.0 3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jasa pengamanan dan kebersihan milik daerah	1 Tahun	-	PIS
0.00.01.2.0 3.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	-	
0.00.01.2.0 5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang terpenuhi kelengkapannya	130 pegawai	-	PIS
0.00.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	130 Paket	-	
0.00.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan daministrasi perkantoran	100 Persen	349.934.400	PIS
0.00.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	80 Paket	5.019.300	PIS
0.00.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	62.504.600	PIS
0.00.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	-	
0.00.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	51.075.000	PIS
0.00.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket	35.352.000	PIS
0.00.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	16.300.000	PIS
0.00.01.2.0 6.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	134.522.000	PIS
0.00.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	45.161.500	PIS
0.00.01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya fasilitas dan peralatan kerja sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah	40 Unit	61.700.000	PIS
0.00.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit	61.700.000	PIS
0.00.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Kantor	100 Persen	250.980.800	PIS
0.00.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	228.730.800	PIS
0.00.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	130 Laporan	22.250.000	PIS
0.00.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Prosen	802.598.000	PIS
0.00.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	80 Unit	150.602.500	PIS
0.00.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	134.020.000	PIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan
0.00.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	517.975.500	PIS
2,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.133.375.300	
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			1.133.375.300	
2.09.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase LPM yang dimandirikan	4,08 Prosen	-	
2.09.02.2.0 1.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dapat mendukung tercapainya kemandirian pangan	10 Unit/LPM	-	Banprov, DAK, PIS
2.09.02.2.0 1.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	80 unit	-	
2.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan terhadap jumlah kebutuhan pangan	159,84 Prosen	256.664.800	
		Persentase kelompok pangan yang terkendali harganya	85,71 Prosen	392.547.700	
		Tingkat Keanekaragaman Konsumsi Pangan	80 Prosen	190.708.400	
2.09.03.2.0 1.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah pangan pokok (beras) yang tersedia dan tersalurkan oleh LUPM maupun oleh daerah	20 Ton/LUPM	392.547.700	PIS
2.09.03.2.0 1.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	10 Laporan	-	
2.09.03.2.0 1.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	3 Unit	122.345.400	PIS
2.09.03.2.0 1.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	3 Unit	-	
2.09.03.2.0 1.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	2 Laporan	95.708.700	PIS
2.09.03.2.0 1.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	10 Laporan	174.493.600	PIS
2.09.03.2.0 2.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah stock gabah di kab. Cirebon	400 ton GKG	256.664.800	PIS
2.09.03.2.0 2.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	229,6 Ton	236.550.000	PIS
2.09.03.2.0 2.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	4 Ton	20.114.800	PIS
2.09.03.2.0 4.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah kelompok / jenis pangan yang kecukupan gizinya memenuhi target	4 Dok	190.708.400	PIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan
2.09.03.2.0 4.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	36.012.600	PIS
2.09.03.2.0 4.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	114.695.800	PIS
2.09.03.2.0 4.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	12 Laporan	40.000.000	PIS
2.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Berkurangnya daerah rawan pangan	13 Daerah/Desa	96.124.600	
2.09.04.2.0 1.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan	1 Dok	39.755.400	PIS
2.09.04.2.0 1.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	39.755.400	PIS
2.09.04.2.0 2.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Rawan Pangan yang ditangani	20 Desa	56.369.200	PIS
2.09.04.2.0 2.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	10 Laporan	56.369.200	PIS
2.09.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT aman dikonsumsi	90 Prosen	197.329.800	
2.09.05.2.0 1.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah sampel yang aman	90 Prosen	197.329.800	PIS
2.09.05.2.0 1.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2 Dokumen	86.987.700	PIS
2.09.05.2.0 1.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2 Dokuman	110.342.100	PIS
3,	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			15.186.237.700	
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			15.186.237.700	
3.25.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	34.214 Ton	9.346.253.100	
3.25.03.2.0 1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku usaha penangkapan ikan yang mendapatkan bantuan	140 Orang	-	PIS
3.25.03.2.0 1.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	-	
3.25.03.2.0 1.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	140 Unit	-	
3.25.03.2.0 2.	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Perikanan tangkap yang terbina	8 Kelompok	7.534.696.00	DAK, PIS
3.25.03.2.0 2.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	600 Orang	7.484.696.00	DAK, PIS
3.25.03.2.0 2.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	16 Kelompok	50.000.000	PIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan
3.25.03.2.0 2.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	2.450 Unit Usaha	-	
3.25.03.2.0 3.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Tempat pelelangan ikan yang beroperasi	7 TPI	1.811.557.100	PIS
3.25.03.2.0 3.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	350 Dokumen	34.731.300	PIS
3.25.03.2.0 3.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	6.920 Layanan	1.776.825.800	DAK, PIS
3.25.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	45.190 Ton	1.085.785.000	
		Jumlah Produksi Pembenuhan Ikan	451 Ton	3.424.503.900	
3.25.04.2.0 1.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rekomendasi Izin Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan	6 Dok	64.848.000	PIS
3.25.04.2.0 1.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1 Rekomendasi	64.848.000	PIS
3.25.04.2.0 2.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	870 Orang	771.393.000	Banpro v, DAK, PIK, PIS, Pokir DPRD
3.25.04.2.0 2.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	24 Kelompok	771.393.000	DAK, PIK, PIS, Pokir DPRD
3.25.04.2.0 3.	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen TDPIK yang diterbitkan	25 Dok	-	PIS
3.25.04.2.0 3.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	25 Rekomendasi	-	
3.25.04.2.0 4.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembenih dan pembudidaya ikan yang terbina	810 Orang	3.674.047.900	DAK, PIS
3.25.04.2.0 4.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit	3.085.000.000	DAK, PIS
3.25.04.2.0 4.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit	339.503.900	DAK, PIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan
3.25.04.2.0 4.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	260 Orang	142.952.900	PIS
3.25.04.2.0 4.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	5 Ha	106.591.100	PIS
3.25.05.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan	1,96 Prosen	-	
3.25.05.2.0 1.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pokmaswas untuk mendukung perairan sumberdaya perikanan	10 kelompok	-	PIS
3.25.05.2.0 1.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	-	
3.25.05.2.0 1.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	-	
3.25.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan hasil Perikanan	11.000 Ton	1.249.999.900	
		Jumlah Konsumsi Ikan	32 Kg/Kapita/Tahun	79.695.800	
3.25.06.2.0 1.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pengolah hasil Perikanan	1 Dok	-	PIS
3.25.06.2.0 1.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	-	
3.25.06.2.0 2.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok Pengolah hasil perikanan yang tebina	8 kelompok	79.695.800	PIS
3.25.06.2.0 2.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	400 Unit Usaha	79.695.800	PIS
3.25.06.2.0 3.	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi bahan baku industri pengolahan ikan	11.000 Ton	1.249.999.900	DAK, PIS
3.25.06.2.0 3.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	510 Pelaku Usaha	1.249.999.900	DAK, PIS
		J U M L A H		24.220.737.500	

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Pendanaan Pelaksanaan Kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan kabupaten Cirebon terdiri dari beberapa pendanaan, hal tersebut tertuang dalam program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional di daerah, adapun pendanaan dalam program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini

Tabel 4.2
Sumberdana pendanaan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

No	Sumber Dana	(Rp.)	Indikator
1.	APBD II / PIS / PIK / POKIR DPRD	24.220.737.500	Pengembangan sektor Ketahanan Pangan dan perikanan pada administrasi maupun teknis pada bidang : <ul style="list-style-type: none">- Sekertariat- Ketersediaan, kerawanan dan distribusi pangan- Konsumsi dan keamanan pangan- Perikanan tangkap, pengolah dan pengawasan sumberdaya perikanan- Perikanan budidaya- UPTD benih ikan
2.	Dana Alokasi Khusus (DAK)		
3.	Tugas Pembantuan (TP)		
JUMLAH		24.220.737.500	

BAB V

PENUTUP

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon telah sepakat untuk melaksanakan Rencana Kinerja yang telah disusun ini demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Tahun 2019-2024. Sebagai suatu instansi pemerintah di Kabupaten Cirebon yang memegang peranan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan Otonomi Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 ini mengacu pada Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan dirumuskannya Rencana Kinerja Tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon bersiap diri menyongsong kondisi dimasa depan melalui rancangan arah yang akan dicapai dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun ini. Rencana Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon ini diharapkan dapat dikomunikasikan kepada seluruh jajaran unit kerja. Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki komitmen bersama untuk maju dari seluruh jajaran unit kerja untuk mendukung keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan.



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR